

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan topik penelitian yang sama dengan penelitian ini ditemukan beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut akan disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan :

Astri Hanjarwati, Siti Aminah (2014) tentang “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota No. 47 tahun 2008 berlangsung dengan baik. Berjalannya program pendidikan inklusi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan baik karena adanya dukungan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota dan *Resource Center* “Pusat Sumber” yang merupakan tempat koordinasi bagi pemerhati pendidikan inklusi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jamil Suprihatiningrum (2016) tentang “Persepsi Siswa Difabel Terhadap Praktik Pendidikan Inklusif di SMA Inklusi Di Yogyakarta”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan inklusif di salah satu sekolah inklusif di Yogyakarta telah berlangsung dengan baik menurut persepsi siswa Tuli dan tuna netra. Walaupun demikian, ada sejumlah tantangan yang masih terjadi terkait dengan pembelajaran yang inklusif,

yaitu: metode dan media pembelajaran yang masih terbatas dan perlu variasi; perangkat pembelajaran yang belum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa difabel; serta jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang masih kurang memadai. Dilihat dari aspek pelaksanaan pendidikan inklusif, siswa difabel berpendapat bahwa perlu beberapa perbaikan pada: perhatian yang lebih baik dari kepala sekolah dan guru; sarana dan prasarana yang aksesibel; penguatan dukungan sistem; dan penyadaran budaya inklusif bagi seluruh warga sekolah

Baby Poernomo (2016) tentang *“The Implementation of Inclusive Education in Indonesia : Current Problems and Challenges”*. Hasil penelitian menunjukkan hambatan ditemukan di sepuluh sekolah dalam lima provinsi dikategorikan ke dalam tema berikut: (a) hambatan lingkungan, (b) hambatan sikap terdiri hambatan sikap yang disengaja dan hambatan sikap yang tidak disengaja. Hambatan lingkungan, hambatan lingkungan yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah. Itu Masalah utamanya adalah ruang belajar yang terletak di lantai satu, sedangkan laboratorium ada di lantai 2. Ini adalah penghalang bagi anak-anak dengan kursi roda untuk bergerak naik tanpa lift. Hambatan sikap yang terjadi, anak-anak berkebutuhan khusus menyekolahkan itu sampai sekarang para guru jarang memberi pengertian kepada semua siswa untuk menghargai perbedaan. Bahkan ada guru yang tahu itu ada anak cacat yang diganggu tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan apa pun dan tampaknya ini tidak serius masalah.

Mohammad Tri Haryanto (2016) tentang *“Pemanfaatan Media Internet oleh Anak Penyandang Disabilitas Netra di SLB-YPAB (Yayasan Pendidikan*

Anak Buta) di Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini yaitu ada sekitar 12 kelas yang saat ini dimiliki oleh YPAB kota Surabaya (SD-LB, SMP-LB, SMA-LB). Penggunaan media internet dalam perannya memenuhi kebutuhan afektif banyak peserta didik gunakan untuk menyelesaikan masalah (72%) kebanyakan masalah terkait pelajaran sekolah (47%), selain itu penggunaan lainnya sebagai pemenuhan rasa senang atau bahagia (61%) dengan media sosial sebagai situs paling sering diakses (60%). Sehingga di era internet ini, sangat memungkinkan bahwa sebuah media internet mampu untuk membantu dalam pemenuhan informasi bagi para penggunanya, terlebih lagi adanya aplikasi pembaca layar atau *screen reader* bagi pengguna dari kalangan penyandang disabilitas netra akan lebih mempermudah dalam mencari informasi tersebut lewat internet.

Ika Devy Pramudiana (2017) tentang “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk ABK Di Surabaya”. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu dari jumlah keseluruhan sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya berjumlah 831 lembaga, dan jumlah sekolah yang telah ditunjuk untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif masih bisa dikatakan belum terlalu maksimal. Sebagian besar lembaga pendidikan di semua jenjang, jumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum mencapai 50%. pemerataan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari segi wilayah juga belum optimal, di mana belum semua Kecamatan memiliki sekolah inklusif dengan jenjang pendidikan tertentu.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zaini Sudarato (2016) tentang “Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif”. Temuan dari penelitian ini adalah kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sudah terpenuhi. Pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut memberikan dampak positif terhadap anak berkebutuhan khusus di Surabaya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ke-6 Lembaga penyelenggara kebijakan (3 SDN dan 3 SMPN) menerima anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan siswa reguler lainnya, dan posisi pembinaan penyelenggaraan pendidikan inklusif tepat berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya. Sehingga program pendidikan inklusif ini dinilai sudah tepat dan efektif.

Mengingat tujuan penelitian ini berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh anak penyandang disabilitas, maka penulis sajikan penelitian terdahulu dengan topik yang serupa.

Penelitian Nadia Wasta Utami (2015) tentang “ Gelap dalam Gemerlap : Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya fasilitas dan layanan pendidikan yang aksesibel bagi komunitas difabel sendiri menambah factor terbatasnya akses informasi yang didapat. Hal ini sebenarnya merupakan masalah umum di sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia pada semua jenjang, dari sekolah sampai perguruan tinggi. Akses informasi hanya didapat dari segelintir komunitas difabel yang memberikan fasilitas meskipun hanya dalam skala yang sangat kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh difabel di Indonesia. Salah satu fasilitas penunjang akademik yang kini menjadi primadona dan memberikan akses informasi bagi kalangan difabel adalah Difabel Corner (DC).

Difabel Corner adalah layanan yang terintegrasi dengan layanan Perpustakaan Pusat UIN SUKA agar koleksi perpustakaan UIN aksesibel, terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh para difabel. DC berfungsi menyediakan alat bantu teknologi yang memungkinkan tunanetra mendapatkan kemudahan mengakses buku. Di antara kelompok disabilitas yang ada, tunanetralah yang paling mengalami kesulitan saat mengakses buku. Untuk itu, dukungan fasilitas teknologi sangat diperlukan, agar tunanetra dapat membaca buku secara mandiri. Difabel Corner yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 2011. Difabel Corner juga memproduksi sendiri koleksi-koleksinya. Mulai dari pencetakan koleksi Braille sampai dengan pembuatan *audio book* dan *eBook*.

Don Passey (2015), berjudul “*Inclusive Technologies and Learning: Research, Practice and Policy*”. Hasil Penelitian menunjukkan gambaran yang cukup mengecewakan tentang praktik universitas yang tidak bergerak ke arah keprihatinan dan implementasi skala luas. Jika hasil saat ini tidak sepositif dan tersebar luas seperti yang diharapkan, ada kemungkinan bahwa bergerak maju mungkin memerlukan pendekatan teknologi baru untuk penyandang disabilitas, serta mempertimbangkan cara-cara lebih lanjut untuk mempengaruhi praktik dan kebijakan secara lebih luas. Terdapat adanya kesenjangan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, dukungan pelajar online, dan kegiatan klub setelah sekolah, kemudian cara orang tua dan wali, konselor dan tutor online berinteraksi dengan peserta didik di seluruh sektor sekolah juga menjadi masalah.

Raquel Suriá Martínez (2011) berjudul “*Disability and The Use Of Ict In Education: Do Students With Special Needs Recognise The Support Given By*

Teachers When Using Technology". Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mempelajari teknologi digunakan untuk melanjutkan studi mereka. Mereka (ABK) tidak memiliki masalah menggunakan teknologi ini dan sepenuhnya sadar pentingnya di dunia akademis mereka. Namun, masih ada masalah kekurangannya dukungan dari pihak guru untuk menangani, menggunakan dan menyesuaikan teknologi ini, meskipun ketersediaan modifikasi tersebut ada di berbagai pusat pendidikan.

Sumana Paul (2016) berjudul "*Educational Technology For Inclusive Classroom*". Hasil penelitian Teknologi komputer adalah bagian penting dari kelas inklusif, terbukti dengan studi Matematika dapat diajarkan secara efektif dalam pengaturan kelas inklusif menggunakan komputer sebagai alat yang dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif. Ketika guru dan siswa diberdayakan oleh strategi inovatif, kurikulum menjadi dapat diakses oleh semua siswa.

Penelitian juga menunjukkan untuk membuat pendidikan inklusif menjadi sukses dan mampu mengajar siswa yang memiliki beragam kemampuan dalam TIK 2. Tim Mengajar, dua guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran, kolaborasi guru ini memberikan manfaat yang besar, misalnya jika seorang siswa tunanetra menulis jawabannya di Braille, guru umum mungkin memerlukan bantuan spesialis untuk mengoreksi jawaban), 3. Pembelajaran Koooperatif, (1 anak khusus dan 2 anak normal)

Tabel 3
Tinjauan Pustaka

No	Identifikasi Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Astri Hanjarwati dan Siti Aminah (2014). <i>Evaluasi Implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta mengenai Pendidikan Inklusi</i>	Program pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan melalui Peraturan Walikota No. 47 tahun 2008 berlangsung dengan baik. Berjalannya program pendidikan inklusi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan baik karena adanya dukungan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota dan <i>Resource Center</i> "Pusat Sumber" yang merupakan tempat koordinasi bagi pemerhati pendidikan inklusi.	Persamaan : 1. Meneliti tentang Evaluasi Pendidikan Inklusi Perbedaan : 1. Penelitian tersebut menggunakan istilah difabel 2. Fokus peneletian hanya pada Kota Yogyakarta bukan DIY secara keseluruhan
2	Jamil Suprihatiningrum (2016) <i>Persepsi Siswa Difabel Terhadap Praktik Pendidikan Inklusif di SMA Inklusi Di Yogyakarta</i>	Pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan inklusif di salah satu sekolah inklusif di Yogyakarta telah berlangsung dengan baik menurut pendapat siswa Tuli dan tuna netra. Walaupun demikian, masih ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi terkait dengan pembelajaran yang inklusif, yaitu: metode dan media pembelajaran yang masih terbatas dan perlu variasi; perangkat pembelajaran yang belum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa difabel; serta jumlah GPK yang masih kurang memadai	Persamaan : 1. Meneliti tentang pendidikan inklusi di DIY 2. Kendala yang dihadapi siswa Perbedaan : 1. Menggunakan istilah difabel 2. Penelitian tersebut hanya memfokuskan pada persepsi siswa difabel bukan kebijakannya 3. Sampel yang digunakan hanya anak tuna netra dan tuna rungu
3	Baby Poernomo (2016) <i>The Implementation of Inclusive Education in Indonesia : Current Problems and Challenges</i>	Hambatan ditemukan di sepuluh sekolah dalam lima provinsi dikategorikan ke dalam tema berikut: (a) hambatan lingkungan, (b) hambatan sikap terdiri hambatan sikap yang disengaja dan hambatan sikap yang tidak disengaja. Hambatan lingkungan yang dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus yang terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah.	Persamaan : 1. Meneliti tentang pendidikan inklusi 2. Hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusi Perbedaan : 1. Penelitian tersebut dilakukan di lima provinsi
4	Muhammad T Haryanto (2016) <i>Pemanfaatan Media Internet oleh Anak Penyandang Disabilitas Netra di SLB-YPAB (Yayasan Pendidikan Anak Buta) di Kota Surabaya</i>	Penggunaan media internet dalam memenuhi kebutuhan afektif banyak peserta didik sebagian besar gunakan untuk menyelesaikan masalah (72%) masalah terkait pelajaran sekolah (47%), pemenuhan rasa senang atau bahagia (61%) dengan media sosial sebagai situs paling sering diakses (60%). Adanya aplikasi pembaca layar atau <i>screen reader</i> bagi kalangan penyandang disabilitas netra akan lebih memudahkan	Persamaan : 1. Membahas penggunaan teknologi untuk mengakses internet pada anak disabilitas Perbedaan : 1. Lokasi penelitian di SLB bukan pendidikan Inkusi 2. Fokus penelitian hanya sebatas pada kegunaan internet secara umum bukan penggunaan

		dalam mencari informasi lewat internet	teknologi disekolah inklusi
5	Ika Devy Pramudiana (2017) <i>Evaluasi Kebijakan Pendidikan inklusif untuk ABK di Surabaya</i>	Angka keseluruhan sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya adalah 831 lembaga, dan sekolah yang telah ditunjuk untk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif masih belum terlalu maksimal. Hampir semua jenjang pendidikan di sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum mencapai 50%. Pemerataan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari segi wilayah juga belum optimal, di mana belum semua Kecamatan memiliki sekolah inklusif.	Persamaan : 1. Meneliti tentang evaluasi pendidikan inklusi Perbedaan : 1. Penelitian tersebut menjelaskan pendidikan inklusi di Surabaya 2. Menggunakan istilah ABK bukan disabilitas
6	Zaini Sudarto (2016) <i>Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-6 penyelenggara kebijakan (3 SDN dan 3 SMPN) menerima anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan siswa reguler. Dalam pelaksanaan implementasi program pendidikan inklusif di Surabaya mengaalami hambatan dari segi SDM, yaitu kurangnya guru pendidik khusus, tidak tersedianya tenaga BK, serta tidak tersedianya tenaga terapis. Namun dari segi sumber daya non-manusia tidak mengalami kendala	Persamaan : 1. Meneliti kebijakan pendidikan inklusi 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi terdapat kurangnya guru khusus Perbedaan : 1. Penelelitian tersebut dilakukan di Jawa Timur 2. Memfokuskan pada 3 SDN dan SMPN saja
7	Nadia Wasta Utami (2015) <i>Gelap dalam Gemerlap : Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel Dalam Gemerlap Era Digitalisasi</i>	Minimnya fasilitas dan layanan pendidikan yang aksesibel bagi komunitas difabel sendiri menambah factor terbatasnya akses informasi yang didapat. Salah satu fasilitas penunjang akademik yang kini menjadi primadona dan memberikan akses informasi bagi kalangan difabel adalah Difabel Corner (DC). Difabel Corner adalah layanan yang terintegrasi dengan layanan Perpustakaan Pusat UIN SUKA agar koleksi perpustakaan UIN aksesibel, terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh para difabel	Persamaan : 1. Membahas kekurangan akses teknologi bagi anak disabilitas Perbedaan : 1. Fokus penelitian hanya pada ketersediaan teknologi khusus di perpustakaan UIN SUKA, dan bukan pada sekolah inklusi 2. Menggunakan istilah difabel bukan disabilitas
8	Don Passey (2015) <i>Inclusive Technologies and Learning: Research, Practice and Policy</i>	Gambaran yang cukup mengecewakan tentang praktik universitas yang tidak bergerak ke arah keprihatinan dan implementasi skala luas. Jika hasil saat ini tidak sepositif dan tersebar luas seperti yang diharapkan, ada kemungkinan bahwa bergerak maju mungkin memerlukan pendekatan teknologi baru untuk penyandang	Persamaan : 1. Mengungkapkan perlunya teknologi khusus bagi penyandang disabilitas Perbedaan : 1. Mengungkapkan respon negatif Universitas terhadap keberadaan anak disabilitas
9	Raquel Suria Martinez (2011) <i>Disability and The Use Of ICT</i>	Mereka (ABK) tidak memiliki masalah menggunakan teknologi ini	Persamaan : 1. Mengungkapkan

	<i>In Education: Do Students With Special Needs Recognise The Support Given By Teachers When Using Technology</i>	dan sepenuhnya sadar pentingnya di dunia akademis mereka. Namun, masih ada masalah kekurangannya dukungan dari pihak guru untuk menangani, menggunakan dan menyesuaikan teknologi ini, meskipun ketersediaan modifikasi tersebut ada di berbagai pusat pendidikan.	pentingnya penggunaan teknologi pada anak disabilitas Perbedaan 1. Menggunakan istilah ABK 2. Siswa disabilitas siap menggunakan teknologi dan menyadari pentingnya teknologi, namun tidak didukung oleh
10	Sumana Paul (2016) <i>Educational Technology For Inclusive Classroom</i>	Teknologi komputer adalah bagian penting dari kelas inklusif, terbukti dengan studi Matematika dapat diajarkan secara efektif dalam pengaturan kelas inklusif menggunakan komputer sebagai alat yang dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif. Ketika guru dan siswa diberdayakan oleh strategi inovatif, kurikulum menjadi dapat diakses oleh semua siswa. Kolaborasi dua guru dalam satu kelas memberikan manfaat yang besar	Persamaan : 1. Menjelaskan manfaat penggunaan teknologi dalam kelas inklusi Perbedaan : 1. Fokus penelitian tersebut pada studi matematika

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, **kebaruan penelitian** ini dapat dilihat dari beberapa point: Pertama penelitian ini tidak hanya membahas tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusi yang sudah banyak dibahas, namun penelitian ini melihat bagaimana teknologi itu dimanfaatkan oleh peserta didik disabilitas disekolah, dan penelitian seperti ini belum ada dilakukan. Kedua, penggunaan teknologi bagi anak disabilitas baru ditemukan di SLB, bukan di sekolah Inklusi dan baru ditemukan di Surabaya, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada

Berdasarkan point tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lebih dalam tentang evaluasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi di DIY tahun 2017

2.2 KERANGKA TEORI

2.2.1 Kebijakan Publik

A. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka keseluruhan di mana tindakan pemerintah dilakukan untuk mencapai tujuan publik. Kebijakan publik difilter melalui proses kebijakan khusus, diadopsi, diimplementasikan melalui hukum, peraturan tindakan, tindakan pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan oleh agensi publik (Cochran dan Milone, 2014 : 8)

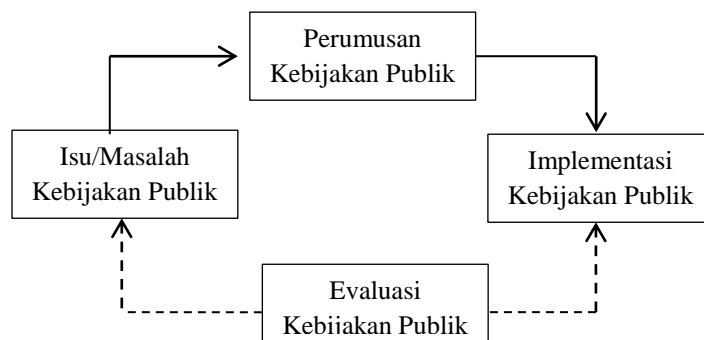
Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. (Islamy, 2002 : 27).

Pendapat lain mengatakan kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri (Wahab, 2010 : 31)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik dengan harapan melindungi masyarakat dari berbagai kemelut yang dihadapinya karena sesungguhnya Publik adalah manusia yang dipandang perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah, publik itu sangat beragam baik latar belakang kehidupannya, maupun harapan dan keinginan-keinginannya, oleh sebab itu mereka harus diintervensi oleh pemerintah agar keberagaman tersebut bisa diatur dan dikendalikan sehingga tidak mengalami konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Parson, 2011 : 15)

Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran sebuah kebijakan publik yang berjalan saat ini tidak serta merta langsung ada, namun melalui sebuah siklus yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Siklus tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1
Siklus Kebijakan Publik



Sumber : Dunn (2009 : 73)

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tidak akan bermakna tanpa di barengi dengan pelaksanaan kebijakan, dengan kata lain pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena kalau tidak dilaksanakan maka kebijakan tersebut hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (Pramudiana, 2017 : 4)

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan

publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas yaitu mulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan (Sirajuddin, 2014 : 4)

Implementasi kebijakan adalah proses perubahan yang dinamis dan berkembang karena sebuah pertemuan faktor, termasuk struktur implementasi, konflik sosiopolitik, dan reformasi administrasi yang membentuk bagaimana kebijakan ide-ide diterjemahkan ke dalam program-program perbaikan (Cargo dan Degroff, 2009 : 13). Lebih lanjut dikatakan bahwa Dalam menentukan implementasi kebijakan, itu berguna untuk membuat perbedaan konseptual antara proses implementasi kebijakan dan kebijakan hasil, meskipun ini bersifat interaktif dalam praktik (O`Toole, 2000 : 266)

Perlunya implementasi kebijakan dikarenakan adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan sehingga perlu memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut. (Akib, 2010 : 3)

2. Tahapan Implementasi

Dalam pengimplementasian kebijakan terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu : (Fixsen, 2009 : 117)

- a. Fase eksplorasi dan adopsi. Merupakan proses mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun sebuah strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi, seperti pengadopsian program berbasis bukti.

- b. Instalasi program. Termasuk pengembangan tujuan, memastikan akses ke pendanaan, dan mengadaptasi organisasi sebagai diperlukan, seperti dengan mempekerjakan lebih banyak staf
- c. Implementasi awal. Digambarkan sebagai proses kompleks perubahan organisasi.
- d. Operasi penuh. Terjadi ketika strategi implementasi berhasil mengintegrasikan intervensi ke dalam operasi rutin.
- e. Inovasi
- f. Keberlanjutan.

Dua tahap terakhir, inovasi dan keberlanjutan, fokus pada apa terjadi sepanjang siklus hidup intervensi, seperti bagaimana program dapat diadaptasi lebih jauh untuk melayani populasi yang ditargetkan dengan lebih baik.

3. Pendekatan implementasi kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan, seperti :

1. Model Top-Down

Pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain (Nugroho, 2011 :47)

Model top-down menyarankan pemerintah untuk memiliki sasaran yang jelas dan konsisten, untuk membatasi tingkat perubahan yang diperlukan, dan untuk menempatkan tanggung jawab implementasi dengan agen yang berwenang dengan tujuan kebijakan. Model-model ini secara teratur mengabaikan aspek politik, seolah-olah pelaksanaannya hanya masalah administrasi, tergantung hanya pada ketersediaan sumber daya. Selain itu, model-model ini cenderung berfokus pada entitas kerajinan kebijakan, daripada mereka yang terkena dampaknya (Cerna 2013 : 18)

Model implementasi kebijakan top-down sebagian besar tidak disukai karena asumsi itu telah terbukti tidak benar. Pada intinya, model top-down mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan dapat menguasai kendali lingkungan implementasi kebijakan dengan kata lain pendekatan rasional mengasumsikan bahwa pencapaian tujuan yang efisien dan efektif dapat diikuti informasi yang memadai, tujuan dan target yang ditentukan dengan cermat, dan pilihan metode yang tepat. (Head dan Alford, 2013 : 13)

Masyarakat modern sekarang dilihat sebagai pluralistik daripada homogen, dan tidak bisa menerima solusi umum top-down. Kelompok sosial semakin banyak menunjukkan perbedaan penting dalam aspirasi, nilai, dan perspektif yang mengaburkan kemungkinan yang jelas dan solusi yang disetujui (Signe, 2017 : 13)

2. Model Bottom-Up

Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya

atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat (Nugroho, 2011 :51)

Metode bottom-up diandalkan untuk menerapkan kebijakan di lapangan yang merupakan sebuah faktor kunci dalam implementasi yang sukses, daripada menerapkan kebijakan dimana masing-masing birokrat dipaksa untuk menyesuaikan mandat kebijakan yang bertujuan sejauh mungkin untuk mengelilingi berbagai kendala sumber daya. Para teoretikus bottom-up cenderung percaya bahwa pengambilan keputusan terpusat tidak diadaptasikan dengan baik kondisi dan fleksibilitas lokal penting untuk mencapai tujuan. Mereka biasanya dikritik karena terlalu menekankan otonomi lokal dan mendukung akuntabilitas administratif atas akuntabilitas demokratis dan kemampuan pemimpin kebijakan untuk menstruktur perilaku lokal (Hill dan Hupe, 2002 : 51)

3. Sintesis Metode Top-Down dan Bottom Up

Seiring dengan dinamika perkembangan waktu, para ilmuwan berupaya besar untuk menggabungkan kedua metode ini, sebab implementasi kebijakan terjadi pada dua level. Pada tingkat implementasi makro, aktor-aktor yang berlokasi di pusat menyusun program pemerintah; pada tingkat microimplementation,

organisasi lokal bereaksi terhadap rencana makro, mengembangkan program mereka sendiri, dan mengimplementasikannya (Signe, 2017 : 18)

Ada enam kriteria yang dapat membuat penggabungan model implementasi ini menjadi berhasil : (Cerna, 2013 :22).

- a. Program ini didasarkan pada kelompok sasaran
- b. Keputusan kebijakan harus mengandung arahan kebijakan yang tidak ambigu dan struktur proses pelaksanaannya dengan cara meningkatkan peluang kinerja yang baik dari kelompok sasaran.
- c. Para pemimpin dan lembaga pelaksana memerlukan keterampilan manajerial dan politik yang signifikan dan komitmen terhadap tujuan.
- d. Program ini juga perlu didukung oleh kelompok konstituen yang terorganisir dan beberapa legislator kunci sepanjang proses.
- e. Prioritas tujuan tidak diruntuhkan dari waktu ke waktu oleh publik yang saling bertentangan

4. Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi

Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : (Rohman, 2009 : 134)

- a. Faktor isi kebijakan memiliki makna yang jelas, dan sasaran yang tepat
- b. Faktor pelaksana kebijakan, hal ini terkait tingkat pendidikan, motivasi, pengalaman, dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan
- c. Faktor sistem instansi pelaksana menyangkut gaya kepemimpinan para pemimpin instansi, target instansi, aturan main instansi, dan target masing-masing tahap yang telah ditetapkan

5. Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam prosesnya, pengimplementasian kebijakan tidak selalu berhasil, sebab ada beberapa faktor yang membuat implementasi tidak berjalan dengan sesuai bahkan menjadi gagal, faktor tersebut seperti :

1. Ambiguitas

Ambiguitas kebijakan berkembang ketika tujuan atau sarana untuk kebijakan terkait tidak jelas. Tingkat ambiguitas dalam intervensi tertentu sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi (Veronesi, Gianluca, and Kevin Keasey, 2015 : 563). Ambiguitas terdiri dari dua kategori, yaitu ambiguitas tujuan dan ambiguitas sarana.

Ambiguitas tujuan mempengaruhi perilaku birokrasi dan kinerja organisasi (Chun dan Rainey, 2005 : 47). Dalam literatur implementasi, ambiguitas tujuan telah secara tradisional dianggap sebagai penyebab utama kegagalan implementasi karena ambiguitas tujuan dapat menciptakan ketidakpastian dan kesalahpahaman.

Pendapat lain menyatakan bahwa dari perspektif pembuatan kebijakan, ambiguitas sasaran tidak selalu selalu "buruk" karena kejelasan tujuan terkadang dapat meningkatkan konflik antar kelompok, yang menyebabkan kurangnya dukungan untuk kebijakan. (Zhan dkk, 2014 : 1012).

Berbeda dengan pendapat Hupe yang menyatakan ambiguitas sebagai masalah, karena akan meninggalkan pelaksana bertanggung jawab untuk menafsirkan kebijakan, yang dapat menyebabkan terhindar dari tujuan (Hupe, 2011 : 71)

2. Pendanaan dan Sumber Daya

Akses ke pendanaan dan sumber daya yang tersedia merupakan prasyarat untuk keberhasilan implementasi. Pendanaan sendiri tidak akan menghasilkan kesuksesan, tanpa ada ketidakmampuan untuk memobilisasi aspek lain dari suatu strategi implementasi. Pendanaan yang stabil adalah kebutuhan instrumental untuk implementasi yang sukses (Durlak dan DuPre, 2008 : 336)

3. Politik dan Konflik

Konflik kebijakan lebih banyak dari satu organisasi, melihat kebijakan secara langsung dan relevan dengan kepentingannya dan ketika organisasi memiliki pandangan tidak selaras. Perbedaan semacam itu dapat timbul berkenaan dengan tujuan yang dianut suatu kebijakan atau kegiatan program yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan. Sengketa atas sarana kebijakan dapat berkembang lebih dari masalah yurisdiksi atau lebih dari substansi sarana yang diusulkan untuk mencapai tujuan. Seringkali aktor memiliki tujuan yang jelas, tetapi pertikaian terjadi karena sudah jelas memiliki tujuan tidak kompatibel (Head and Alford, 2013 : 21)

C. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai penelitian yang secara khusus dirancang untuk menilai kegiatan dan dampak program atau kebijakan sehingga dapat menentukan apakah kegiatan atau program atau kebijakan yang dimaksud pantas untuk dikembangkan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk kepentingan jangka panjang/keberlanjutan suatu program. (Buse dan Mays, 2000 : 36)

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012:7)

Evaluasi dapat dikatakan sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (Stufflebeam, 2004 : 119)

2. Model Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan evaluasi. Model evaluasi adalah rancangan yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Para ahli evaluasi telah berusaha merancang model evaluasi yang dapat digunakan oleh para evaluator.

1. Model Helmut Wollman (2007).

Menurut Wollman (2007:393) ada 3 tipe evaluasi kebijakan yaitu *Ex-ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation*.

- a. *Ex-ante evaluation*. Adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal terhadap perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. *Ex-ante evaluation* adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari

berbagai opsi kebijakan yang ada. Evaluasi tipe ini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.

- b. *Ongoing Evaluation*. Mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Hakikat dari *Ongoing evaluation* adalah untuk memberikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan, terutama pada tahapan tertentu dari implelementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki, revisi, meluruskan kembali proses implelementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.
- c. *Ex-post evaluation*. Menurut Wollman ini merupakan tipe klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

3. Desain evaluasi kebijakan

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, dapat digunakan desain berikut untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi;

Gambar 2
Desain Evaluasi Kebijakan

		Strength of design	
		High	Low
Strength of implementation	High	1.	2.
	Low	3.	4.

Sumber : (Kusek dan Risk, 2004 : 119)

Keterangan :

- a. Kuadran nomor 1 adalah tempat terbaik dimana desain kuat yang diimplementasikan juga dengan kuat
- b. Kuadran nomor 2 menghasilkan ambiguitas yang cukup besar dalam hal kinerja pada indikator hasil dalam situasi ini ada desain yang lemah yang diimplementasikan dengan kuat, tetapi dengan hasil yang tidak terlalu jelas
- c. Kuadran nomor 3 juga menghasilkan ambiguitas yang cukup besar dalam hal kinerja sehubungan dengan indikator hasil. Dalam situasi seperti ini ada desain yang dibuat dengan baik yang diimplementasikan dengan buruk
- d. Kuadran 4 bukan tempat yang bagus, Desain yang lemah yang diimplementasikan dengan buruk hanya menyisakan puing-puing rencana yang baik. Tidak akan ada bukti hasil. Informasi evaluasi dapat didokumentasikan baik desain yang lemah maupun implementasi yang buruk

4. Fungsi evaluasi kebijakan

Dalam perkembangannya, evaluasi sangat diperlukan dalam melihat kinerja dari kebijakan/program itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Subarsono (2011:120-121) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan

5. Indikator dalam evaluasi kebijakan publik

Empat indikator pokok dalam evaluasi kebijakan yaitu *input*, *proses*, *outputs*, dan *outcomes*. Masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan berikut ini : (Badjuri, 2002 : 138)

- a. Indikator *input* (masukan).

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur lainnya

- b. Indikator *process* (proses)

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu

- c. Indikator *outputs* (hasil)

Indikator hasil, memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik, indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu

d. Indikator outcomes (dampak)

Indikator dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan

2.2.2 Penyandang Disabilitas

a. Definisi penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas itu sendiri dapat dimaknai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016, 2016, Pasal. 1).

Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011 (Sholeh, 2015 : 9)

Disabilitas adalah masalah hak asasi manusia karena : (Quinn dan Degener, 2002 : 5)

1. Orang-orang dengan disabilitas mengalami ketidaksetaraan - misalnya, ketika mereka ditolak akses yang sama terhadap perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, atau partisipasi politik karena kecacatan mereka
2. Orang-orang dengan disabilitas tunduk pada pelanggaran martabat misalnya, ketika mereka mengalami kekerasan, pelecehan, prasangka, atau ketidakhormatan karena kecacatan mereka.
3. Sebagian penyandang disabilitas tidak diberikan otonomi - misalnya, ketika mereka mengalami sterilisasi paksa, atau ketika mereka dikurung di institusi yang bertentangan dengan keinginan mereka, atau ketika mereka dianggap tidak kompeten secara hukum karena kecacatan mereka.

Berbagai dokumen internasional telah menyoroti bahwa disabilitas adalah masalah hak asasi manusia, termasuk Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk People with Disabilities (1993) (World Report on Disability, 2011 : 33)

Pendapat lain menyatakan bahwa disabilitas adalah masalah pembangunan, karena kaitan dua arahnya dengan kemiskinan: disabilitas dapat meningkatkan risiko kemiskinan, dan kemiskinan dapat meningkatkan risiko kecatatan. Semakin banyak bukti empiris dari seluruh dunia menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas dan keluarga mereka lebih mungkin mengalami kerugian ekonomi dan sosial daripada mereka yang tidak cacat (Sartorius dan Schulze, 2005 : 38)

Permulaan kecacatan dapat mengarah pada memburuknya kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kemiskinan melalui banyak saluran termasuk dampak buruk pada pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan peningkatan pengeluaran yang berkaitan dengan disabilitas (Jenkins dan Rigg, 2003 : 74)

1. Anak-anak penyandang disabilitas cenderung tidak bersekolah, sehingga mengalami peluang terbatas untuk pembentukan modal manusia dan menghadapi kesempatan kerja yang berkurang dan penurunan produktivitas di masa dewasa
2. Orang-orang dengan disabilitas lebih cenderung menganggur dan umumnya berpenghasilan lebih rendah meskipun dipekerjakan. Pekerjaan dan hasil pendapatan tampak memburuk dengan tingkat keparahan kecacatan, lebih sulit bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan keluar dari kemiskinan karena diskriminasi dalam pekerjaan, akses terbatas untuk transportasi, dan kurangnya akses ke sumber daya untuk mempromosikan kegiatan wirausaha dan mata pencaharian (Burchardt, 2005 : 34)
3. Penyandang disabilitas mungkin memiliki biaya tambahan akibat disabilitas - seperti biaya yang terkait dengan perawatan medis atau alat bantu, atau kebutuhan untuk dukungan dan bantuan pribadi - dan dengan demikian sering membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mencapai hasil yang sama dengan orang-orang yang tidak disabilitas (Zaidi dan Burchardt, 2005 : 35)

b. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Klasifikasi difabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dibedakan menjadi empat, yaitu: fisik, intelektual, mental dan sensorik

- a. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan mental yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
- d. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

2.2.3 Pendidikan Inklusi Berbasis Teknologi Informasi

a. Definisi pendidikan inklusi

Salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dalam bidang pendidikan adalah pendidikan inklusi. Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah mengintruksikan kepada lembaga pendidikan disemua jenjang untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Sehingga dampak nyata yang harus diterima adalah semua pelaksana di lembaga pendidikan harus menerima

semua peserta didik tanpa terkecuali, termasuk peserta didik yang mengalami hambatan fisik, psikis, perilaku dan spiko sosialnya di sekolah-sekolah reguler yang biasanya dimasuki anak-anak non berkebutuhan khusus atau reguler.

Hakikat pendidikan inklusi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan cara tidak membeda-bedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. (Sudarto, 2016 : 2). Lebih lanjut pernyataan Hildegun Olsen yang dikutip oleh Tarmansyah (2007 : 82) pendidikan inklusi mewajibkan sekolah untuk menampung semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat.

b. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusi

1. UUD 1945
2. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah DIY No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
5. Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

c. Tujuan Pendidikan Inklusi

Dengan adanya pendidikan inklusi, peserta didik penyandang disabilitas dididik bersama-sama anak lainnya (non-disabilitas) yang berguna untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tujuan dari pendidikan inklusi bagi siswa non-disabilitas adalah untuk mengajarkan pada siswa agar dapat mengapresiasi dan menghargai orang lain, dapat menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat luas, dapat menghargai perbedaan cara pandang serta dan dapat menerima tugas perutusan dalam masyarakat dan lingkungan sosialnya. Selain itu, untuk meningkatkan interaksi antara siswa disabilitas dengan siswa normal di samping memberlakukan hak pendidikan yang sama untuk anak-anak tanpa ada perbedaan. (Hanjarwati, Aminah, 2014 : 13)

Pendapat lain mengemukakan bahwa tujuan yang ingin diperoleh anak disabilitas dalam mengikut sertakan diri dalam kegiatan belajar inklusi antara lain adalah: (Pramudiana 2017 : 5)

1. Anak menjadi percaya diri, mereka merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang didapat.
2. Anak menjadi mandiri, sebab mereka belajar memahami dan mengaplikasikan pelajaran yang didapat di sekolah kedalam lingkungan keseharian mereka.
3. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara aktif dengan teman sekolah, guru, dan lingkungan masyarakat.

d. Indikator Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Indikator yang digunakan dalam implementasi penyelenggara pendidikan inklusif : (Wartomo, 2016 : 13).

1. Kelembagaan
2. Kurikulum pembelajaran,
3. Ketenagaan
4. Kesiswaan
5. Sarana Prasarana
6. Pembiayaan.

e. Teknologi Informasi (TI) Dalam Sekolah Inklusi

Dampak nyata dari arus perkembangan di bidang teknologi informasi telah memicu penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk segera berbenah, dan menuntut agar pemberi pelayanan pendidikan inklusi tidak gagap teknologi. Pembelajaran bagi siswa disabilitas harus lebih banyak memanfaatkan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan membekali para peserta didik untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara luas dan mampu memenuhi tantangan masa depan. Peran teknologi informasi bagi sekolah inklusi dapat dilihat dari setiap kegiatan pendidikan perencanaan kurikulum, pengiriman materi instruksi, mengelola penilaian, dan berkomunikasi dengan siswa dapat diperpanjang dan ditingkatkan melalui penggunaan suatu platform pembelajaran yang tepat. (Edwards, 2006: 96)

Kemajuan teknologi informasi harus disikapi secara bijak, dan mampu mengakomodir pemberian pendidikan bagi peserta didik disabilitas tanpa terkecuali. Dalam konteks pendidikan khusus terdapat 4 komponen utama yaitu : (Arianti, 2017 : 1)

1. *Physical Enviroment* (lingkungan fisik)
2. *Teaching Procedures* (prosedur mengajar)
3. *Teaching Content / Materials* (materi / isi pelajaran)
4. *Use of adaptive equipment* (penggunaan alat-alat adaptif)

Salah satu komponen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu penggunaan alat adaptif. Diantara pentingnya makna teknologi adaptif yaitu membantu para siswa disabilitas mengerjakan tugas-tugas di sekolah dan membantu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk dari teknologi adaptif ini adalah komputer. Komputer sebagai alat adaptif dapat meningkatkan proses belajar mengajar. Manfaat dari penggunaan komputer menurut Sujana (2002 : 2) adalah :

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian anak disabilitas, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar
2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dapat dipahami oleh anak disabilitas, dan memungkinkan mereka menguasai tujuan pembelajaran dengan baik
3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga anak disabilitas tidak bosan
4. Anak disabilitas akan banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya

Terkait dengan kecacatan fisik atau intelektual anak, ada beberapa teknologi yang mampu menolong peserta didik sehingga dapat memfasilitasi pendidikan inklusi agar mencapai keberhasilan seperti :

Keyboard-nya yang dirancang khusus atau di modifikasi, sehingga dapat digunakan untuk anak yang hanya memiliki satu tangan atau satu jari untuk mengetik. Program pengenalan suara juga memungkinkan siswa dengan berbagai disabilitas fisik untuk memasukkan teks ke dalam komputer dengan berbicara. Teknologi *Joysticks* juga telah dikembangkan untuk memungkinkan seseorang mengontrol komputer dengan menunjuknya dengan dagu atau kepalanya, atau *Software* translasi Braille dapat mengonversikan teks menjadi format Braille yang tepat. Perangkat lunak pembesaran-layar memperbesar ukuran teks dan grafik, mirip dengan *captioning* dan tampilan *real-time graphics* di televisi, yang menyiarkan dialog dan tindakan di acara atau film televisi melalui teks tercetak. (Sugiarman, 2015 : 6)

Computer speech synthesizers mampu menghasilkan kata-kata lisan. *Speech recognition software* (*software* untuk mengenali suara) dapat membantu siswa-siswa yang hanya dapat mengucapkan beberapa bunyi untuk mengerjakan berbagai tugas. Seseorang diajari beberapa bunyi tombol yang mampu di tanggapi oleh komputer yang memiliki program secara khusus. Perlengkapan itu dapat dikategorikan sebagai teknologi rendah dan teknologi tinggi

Tabel 4

Kategori Teknologi Bagi Siswa Penyandang Disabilitas

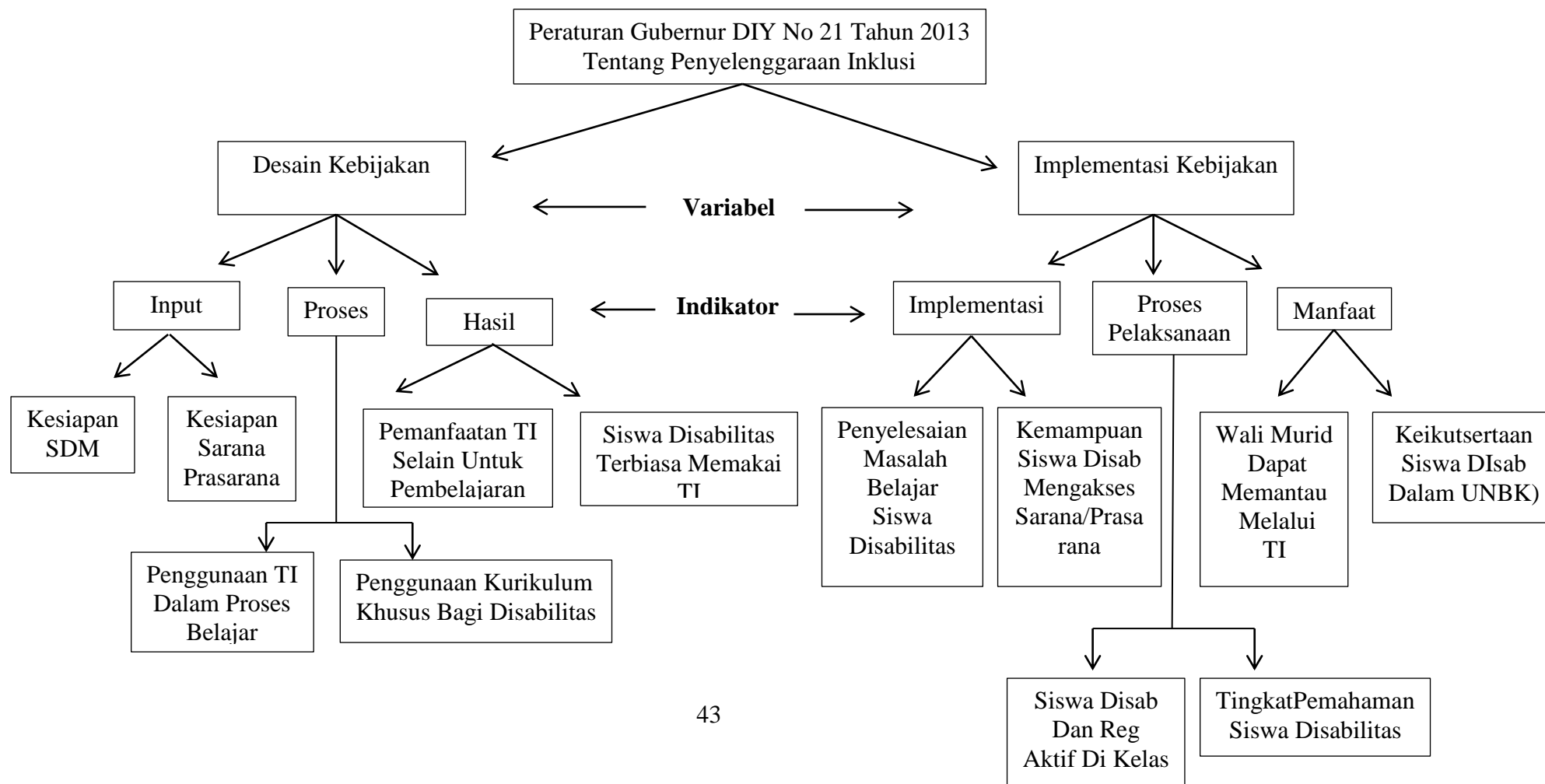
Perlengkapan Teknologi Rendah	Perlengkapan Teknologi Tinggi
<i>Keyboard</i> bertombol warna	<i>Printer</i> braile
Pembalik halaman mekanis	Program pembaca layar
Jam yang dapat berbicara	Pengolah suara
<i>Tape recorders</i>	Pemindai teks
Tablet Sentuh	Perlengkapan input yang dikendalikan pandangan

Sumber : (Sugiarman, 2015 : 17)

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 3

Kerangka Berfikir



2.4 Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Desain Kebijakan Pendidikan Inklusi Berbasis TI

Desain kebijakan pendidikan inklusi adalah sebuah rancangan yang digunakan untuk membuat sebuah kebijakan yang fungsinya untuk mencari solusi dari adanya masalah publik. Dalam mendesain kebijakan pendidikan inklusi, dapat diawali dari merumuskan permasalahan yang terdapat dalam pendidikan inklusi, menetapkan tujuan, menyiapkan alur penyelesaian masalah, mencari alternatif jawaban untuk masalah pendidikan inklusi, dan tahap terakhir adalah merumuskan kebijakan kebijakn pendidikan inklusi, yang mana harapannya adalah masalah-masalah publik yang terkait dengan pendidikan inklusi dapat terselesaikan.

b. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi merupakan tahap pelaksanaan dari perumusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi diaplikasikan kedalam sekolah yang terdapat peserta didik disabilitas, dan secara tidak langsung memaksa peserta didik disabilitas untuk mampu mengoperasikan TI. Tanpa pengimplementasian, rancangan kebijakan ini hanya akan menjadi rencana tanpa mampu menyelesaikan masalah publik.

2.5 Definisi Operasional

a. Desain kebijakan pendidikan inklusi

1. Input : Input dapat diartikan sebagai bahan masukan yang dapat menggerakkan sistem, dalam hal ini yang menjadi input dari kebijakan pendidikan inklusi adalah kesediaan SDM (Guru Reguler dan Guru Pendamping Khusus (GPK)), dan kesiapan sarana prasarana termasuk kesediaan TI
2. Proses : Proses merupakan tahap pelaksanaan dari adanya input dalam sistem kebijakan dimana Guru dan Guru Pendamping Khusus tersebut mengajar dikelas inklusi, keramahan sarana prasarana termasuk kesediaan Ti yang dapat dijangkau oleh peserta didik disabilitas, seperti penggunaan TI di dalam kelas oleh guru ataupun peserta didik reguler dan disabilitas
3. Hasil : Hasil merupakan perolehan dari pemrosesan input tersebut. Dalam hal ini yang menjadi hasil dalam kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi adalah apakah TI itu digunakan hanya pada saat proses pembelajaran saja dan apakah orang tua dapat memantau perkembangan anak melalui TI

b. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi informasi

1. Implementasi Input : Implementasi input merupakan tahap pelaksanaan pengolahan input untuk di proses didalam sebuah sistem kebijakan. Dalam hal ini implementasi input, guru sebagai input dari kebijakan pendidikan inklusi bekerja mencari solusi terbaik untuk

masalah belajar siswa disabilitas, selain itu pihak sekolah juga harus mengusahakan agar semua peserta didik termasuk peserta didik inklusi agar dapat mengakses sarana dan prasarana sekolah

2. Proses Implementasi : Proses implementasi merupakan proses pelaksanaan pengelolaan input (Sumber Daya) hingga menghasilkan output yang di inginkan. Dalam hal ini proses implementasi pada kebijakan pendidikan inklusi berbasis teknologi yaitu akan menjawab apakah siswa reguler dan siswa disabilitas lebih memahami pelajaran akibat menggunakan TI atau tidak dalam proses pembelajaran dan juga apakah para peserta didik lebih aktif atau tidak
3. Manfaat : Manfaat bermaksud bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut memang berguna untuk masyarakat luas, dan mampu menjawab persoalan publik. Dalam kebijakan pendidikan inklusi berbasis TI ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk siswa saja akan tetapi untuk orang tua berupa keaktifan orang tua dalam memantau kedisiplinan dan hasil belajar peserta didik melalui TI dan masih banyak manfaat lainnya.